

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebagai instansi pemerintahan mengikuti tentang ubahan tata kelola keuangan negara bersumber dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Penyusunan anggaran dalam instansi pemerintah harus dilaksanakan dengan baik, karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 disebutkan bahwa Menteri sebagai pengguna anggaran dan barang Kementerian negara yang memimpin harus menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara, dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan melaksanakan anggaran, juga menyetor kepada Kas Negara, mengelola barang milik negara ataupun kekayaan negara, piutang juga utang negara yang menjadi tanggungjawabnya, menyusun serta menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara.

Penyusunan anggaran tersebut juga harus dilakukan sesuai dengan relisasinya, mengingat pada pasal 30 menyatakan presiden harus menginformasikan rancangan UU tentang tanggungjawab terhadap APBN ke DPR berupa laporan keuangan yang diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini antara lain LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CaLK yang dilampiri laporan perusahaan negara juga badan lainnya. Selain itu berdasarkan pasal 32 bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran pemerintah disusun juga disajikan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Penyusunan anggaran dalam Instansi Pemerintah adalah hal penting dalam tata kelola keuangan instansi pemerintah dalam mencapai hasil

sesuai target yang ditentukan. Penyusunan anggaran harus dibarengi dengan sistem perencanaan serta koordinasi juga pengendalian dalam instansi terkoordinir dan terkendali dengan baik pula. Lembaga atau instansi pemerintah harus mempunyai pimpinan yang mempunyai skill dengan baik dan professional agar dapat mengelola suatu instansi atau lembaga supaya dapat menjamin tercapainya target juga sasaran pembangunan yang efektif, maka diperlukan alat bantu untuk melaksanakannya yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Laporan Keuangan adalah laporan dari hasil kegiatan yang di lakukan dan disajikan dalam bentuk informasi kepada para pengguna kepentingan baik internal maupun eksternal serta pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan di sajikan secara akurat, tepat dan terbuka, laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap APBN yang telah di tetapkan.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah, suatu lembaga atau instansi terdapat berbagai proses yang harus dilakukan sebelum nantinya jadi sebuah Laporan sebagai laporan pertanggungjawaban suatu instansi atau lembaga tersebut, salah satu proses yang ada dalam penyusunan laporan keuangan ialah pengumpulan berbagai dokumen dan sumber pendukung lainnya serta melakukan verifikasi berbagai dokumen tersebut sehingga terkumpul berbagai informasi valid yang dapat digunakan sebagai proses selanjutnya dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Pos-pos atau akun yang terkait dalam LRA pun harus di sajikan secara terperinci dan sesuai dengan aktivitas atau realisasi yang terjadi selama periode tertentu dan harus dijelaskan sebagaimana mestinya agar sifat Laporan Keuangan yang salah satunya transparan atau terbuka dapat selalu dipertahakan dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap instansi atau lembaga terkait.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan wajib menyelenggarakan akuntansi serta memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dengan membuat laporan keuangan. Laporan Keuangan ini dibuat dengan basis akrual serta harus memberikan informasi keuangan yang

akuntabel, transparan, dan akurat agar dapat membuat informasi yang digunakan untuk manajemen dalam membuat keputusan serta dalam rangka menjadikan tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam laporan keuangan, akun belanja tentunya menjadi salah satu pengaruh besar bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Karena pada dasarnya, setiap instansi, pasti membelanjakan segala keperluannya disetiap periode. Belanja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dimulai dari mempersiapkan dokumen pengajuan belanja, lalu memverifikasi dokumen, kemudian persetujuan perbendaharaan, dan mencairkan dana kepada pihak ketiga. Transaksi ini juga diinput kedalam aplikasi pemerintahan bernama OM-SPAN.

Setiap pengeluaran kas yang berhubungan dengan belanja, tentunya akan dilakukan pencatatan karena memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan untuk setiap periode tahun yang akan datang. Maka berdasarkan pembahasan diatas, saya tertarik untuk melakukan Tinjauan lebih lanjut yang dijelaskan dalam laporan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Atas Pencatatan Belanja Barang Pada Laporan Keuangan Di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian”**

I.2 Tujuan

Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pencatatan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, contohnya pencatatan belanja barang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana pencatatan belanja barang terhadap laporan keuangan yang berdasarkan pada pengklasifikasian atau pengelompokan sesuai pernyataan standar akuntansi pemerintah terhadap belanja.
3. Untuk mengetahui belanja apa saja yang digunakan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
4. Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

5. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang dipakai pada saat pengajuan pembelian belanja barang.

I.3 Manfaat

Manfaat tugas akhir ini adalah:

1. Secara Teoritis

Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai perkembangan ilmu, kreatifitas, serta membangkitkan pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang telah dipelajari pada saat perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Atas Pencatatan Belanja Barang Pada Laporan Keuangan Di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Sebagai bahan tinjauan pemerintah untuk lebih baik dalam melakukan pencatatan belanja, khususnya belanja barang di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

- b. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta pengalaman tentang teori yang diterapkan dalam perkuliahan, khususnya dalam teknik pencatatan belanja barang terhadap laporan keuangan.

- c. Bagi Universitas

Sebagai dasar pembelajaran yang ditunjukkan untuk para pembaca serta referensi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Laporan ini dapat menjadi rujukan untuk Laporan Tugas Akhir di masa yang akan datang.